

KEDAULATAN POLITIK KELOMPOK MISKIN PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024

Muh. Iqbal Latief¹, Ridwan Syam², Hariashari Rahim³, Ria Renita Abbas⁴,
Musriyani⁵, Pratiwi Wulandari⁶, Suriyani⁷

^{1,2,3,4,5,6} Departemen Sosiologi, Universitas Hasanuddin

⁷ Jurusan Sosiologi Agama, UIN Alauddin Makassar

¹muhilberkelana@gmail.com, ²ridwansyam@unhas.ac.id,

³ashari.arrahim@unhas.ac.id, ⁴ridwansyam@unhas.ac.id,

⁵ashari.arrahim@unhas.ac.id, ⁶pratiwiwulandari21@gmail.com,

⁷suriyanisyam009@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait tipologi pertukaran sosial kedaulatan politik kelompok miskin pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2024 dengan pendekatan teori pertukaran sosial Peter M. Blau. Pemilihan Walikota Makassar tahun 2024 menjadi arena penting dalam melihat dinamika relasi antara pemilih dan kandidat, khususnya dalam konteks kelompok miskin kota. Di tengah berbagai kampanye dan mobilisasi politik, kelompok miskin sering kali diposisikan bukan sebagai subjek politik yang otonom, melainkan sebagai objek yang dimobilisasi melalui praktik pertukaran sosial yang sarat dengan imbalan material. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kedaulatan politik kelompok miskin berada dalam posisi rentan, karena suara yang seharusnya mencerminkan aspirasi dan kebebasan justru dipertukarkan dengan kebutuhan dasar seperti uang, sembako, atau janji kesejahteraan. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pemilih kelompok miskin di Kota Makassar masuk dalam kategori pertukaran ekstrinsik, karena suara mereka dipertukarkan dengan uang dan sembako, meskipun ada juga dari mereka yang memilih berdasarkan pada kedekatan dan relasi sosial lama. Namun dalam penelitian ini ditemukan model pertukaran baru yaitu pertukaran “bandit”, karena tim sukses dan pemilih kelompok miskin memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Sebaliknya, kandidat menderita kerugian material dan sosial. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu masuk kedalam dunia pengalaman subjek melalui wawancara mendalam selama 3 bulan.

Kata Kunci: Kedaulatan Politik; Kelompok Miskin; Pilkada; Pertukaran Sosial

I. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen utama demokrasi lokal di Indonesia. Namun dalam praktiknya, terutama di kalangan masyarakat miskin, proses ini kerap berlangsung dalam bayang-bayang politik transaksional. Pemilih miskin sering kali tidak memanfaatkan hak pilihnya secara bebas dan berdaulat, melainkan menjadikan suara sebagai alat tukar untuk mendapatkan keuntungan sesaat seperti uang tunai atau bantuan sembako. Hal ini menunjukkan adanya relasi sosial yang bersifat pragmatis dan materialistik dalam kontestasi politik lokal. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji ulang makna kedaulatan politik dalam konteks struktural kemiskinan.

Pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran sosial Peter M. Blau, yang menjelaskan bahwa interaksi sosial didasarkan pada keuntungan timbal balik. Dalam konteks ini, kedaulatan politik masyarakat miskin dapat dipahami sebagai hasil dari proses pertukaran antara suara dan imbalan dalam ruang sosial yang tidak setara (Blau, 1964).

Pemilu 2024 di Kota Makassar menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi strategi utama untuk menarik suara masyarakat miskin. Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pemilih, banyak yang mengaku menerima uang tunai antara Rp50.000 hingga Rp150.000, serta bantuan sembako menjelang hari pemilihan. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa mereka tidak akan datang ke TPS jika tidak ada imbalan yang diberikan oleh tim sukses. Temuan ini diperkuat oleh laporan pengawasan Bawaslu Sulsel yang menunjukkan bahwa dugaan politik uang paling banyak terjadi di kawasan kumuh dan wilayah padat berpenduduk miskin (Bawaslu Sulsel, 2024). Di sisi lain, tim sukses juga mengakui bahwa pendekatan berbasis relasi sosial atau program kandidat sulit diterima tanpa adanya insentif materi. Bahkan, dalam beberapa kasus, terjadi praktik manipulatif di mana tim sukses mengurangi jumlah imbalan yang seharusnya diterima oleh pemilih. Situasi ini memperlihatkan relasi pertukaran yang tidak seimbang dan sangat pragmatis. Hubungan antara kandidat dan pemilih miskin lebih menyerupai transaksi jual beli suara, bukan keterlibatan politik yang sadar dan partisipatif. Fenomena ini menjadi pintu masuk penting untuk memetakan tipologi pertukaran sosial yang terbentuk dalam kerangka relasi kuasa dan kebutuhan ekonomi.

Peter M. Blau, dalam teori pertukaran sosialnya, memandang bahwa tindakan sosial tidak terlepas dari motif untuk mendapatkan keuntungan. Dalam relasi sosial, pertukaran dapat

terjadi secara instrinsik (berbasis hubungan sosial), ekstrinsik (berbasis imbalan materi), maupun bauran. Namun, dalam konteks kemiskinan struktural, pertukaran sosial cenderung bersifat ekstrinsik karena tekanan kebutuhan hidup. Blau juga menjelaskan bahwa pertukaran tidak selalu berlangsung seimbang, terutama jika terjadi dalam kondisi ketimpangan status dan kekuasaan. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana suara kelompok miskin dalam Pilwalkot Makassar 2024 menjadi komoditas dalam praktik politik uang. Dengan pendekatan ini, studi ini tidak hanya memetakan bentuk-bentuk pertukaran sosial yang terjadi, tetapi juga menawarkan pembacaan kritis terhadap makna kedaulatan politik dalam konteks ketimpangan ekonomi dan sosial (Blau, 1964; Ritzer, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana tipologi pertukaran sosial yang membentuk praktik kedaulatan politik kelompok miskin dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2024? Pertanyaan ini penting untuk memahami apakah suara kelompok miskin benar-benar merepresentasikan kedaulatan politik, atau justru merupakan bagian dari relasi sosial yang bersifat transaksional dan timpang. Penelitian ini juga berupaya mengungkap pola-pola baru dalam praktik pertukaran politik uang yang tidak dijelaskan dalam tipologi klasik pertukaran sosial Blau.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, tujuannya adalah untuk memahami pengalaman langsung dari para pemilih miskin dalam merespons Pilwalkot Makassar tahun 2024, terutama bagaimana mereka menjalankan atau mentransaksikan kedaulatan politiknya. Pendekatan penelitian fenomenologi mencoba memahami peristiwa-peristiwa kehidupan manusia dalam kerangka pemikiran dan perilaku masyarakat sebagaimana yang dipahami atau dipikirkan oleh individu itu sendiri. Penelitian fenomenologis memberikan jawaban atas permasalahan ontologis. (Fitriana 2018) Studi fenomenologi bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang realitas. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Pemilihan informan menggunakan metode *purposive*, yaitu memilih informan kelompok miskin adalah individu yang mampu merepresentasikan pandangan, pikiran, sikap dan tingkah laku kelompok. Penelitian lapangan dilaksanakan selama tiga bulan dari Desember 2024-Februari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kedaulatan politik kelompok miskin dalam Pemilihan Walikota Makassar 2024 sangat dipengaruhi oleh relasi pertukaran yang bersifat pragmatis dan materialistik. Mayoritas pemilih dari kelompok miskin melakukan transaksi politik berupa penukaran suara dengan imbalan materi, seperti uang tunai dan sembako. Dalam wawancara, beberapa warga secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak akan memilih jika tidak ada "uang transport" atau "paket bantuan" yang diberikan oleh tim sukses. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Pilkada dianggap sebagai "musim rezeki" yang hanya datang lima tahun sekali.

Berdasarkan teori Peter M. Blau, bentuk pertukaran sosial semacam ini masuk dalam kategori pertukaran ekstrinsik, yaitu interaksi yang didasarkan pada keuntungan ekonomi atau materi. Suara tidak lagi dimaknai sebagai hak politik yang mencerminkan aspirasi, melainkan sebagai barang yang memiliki nilai tukar. Dalam situasi ini, tidak terjadi hubungan jangka panjang atau komitmen politik antara pemilih dan kandidat. Hubungan hanya berlangsung sebentar, sebatas saat kampanye dan menjelang hari pemungutan suara.

Selain pertukaran ekstrinsik, penelitian ini juga menemukan bentuk pertukaran sosial bauran, meskipun dalam jumlah yang kecil. Beberapa pemilih menyatakan memilih kandidat tertentu karena merasa memiliki kedekatan secara sosial, seperti karena sering dibantu dalam urusan RT/RW atau karena berasal dari kampung yang sama. Namun, kedekatan ini tetap dibarengi dengan pemberian materi. Artinya, aspek emosional tetap muncul, tetapi tidak berdiri sendiri selalu bersandingan dengan keuntungan materiil.

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah munculnya bentuk baru yang disebut sebagai pertukaran bandit. Tipologi ini muncul ketika kedua pihak, yaitu pemilih dan tim sukses, sama-sama menjalankan praktik pertukaran yang manipulatif dan saling menipu. Misalnya, pemilih menerima uang atau bantuan dari lebih dari satu kandidat, namun tidak berkomitmen memilih salah satunya. Mereka cenderung menunggu siapa yang memberi imbalan paling besar atau bahkan mengambil semuanya, lalu tetap memilih secara bebas atau bahkan tidak memilih sama sekali. Di sisi lain, tim sukses juga banyak yang melakukan manipulasi, seperti memotong jumlah uang yang harusnya disalurkan, atau membuat janji-janji palsu yang tidak ditindaklanjuti setelah pemilu. Pola ini menyebabkan kerugian ganda, terutama bagi kandidat, baik dari sisi biaya maupun kepercayaan publik.

Dalam perspektif Blau, pertukaran sosial seharusnya menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dan memperkuat struktur sosial. Namun dalam konteks ini, pertukaran yang terjadi bersifat eksploitatif dan temporer, menciptakan relasi yang rapuh dan tidak sehat. Tidak ada investasi sosial jangka panjang, dan suara politik tidak memperkuat posisi warga miskin dalam sistem, melainkan justru memperdalam keterpinggiran mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan politik kelompok miskin tidak terbentuk secara substansial. Tipologi pertukaran sosial yang ditemukan ekstrinsik, bauran, dan bandit menggambarkan bagaimana suara politik masyarakat miskin terperangkap dalam logika transaksi jangka pendek. Model “pertukaran bandit” menjadi temuan penting karena menunjukkan adanya pola penyimpangan dari skema pertukaran yang lazim: tidak hanya pasif dan tergoda materi, pemilih juga menunjukkan perilaku aktif yang oportunistik, sementara tim sukses juga terjebak dalam praktik manipulatif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan hanya mempengaruhi perilaku politik, tetapi juga membentuk pola relasi sosial-politik yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Oleh karena itu, upaya membangun demokrasi substantif di tingkat lokal tidak bisa dilepaskan dari agenda mengatasi ketimpangan sosial dan membangun kesadaran politik yang kritis, terutama di kalangan kelompok miskin.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan politik kelompok miskin dalam Pemilihan Walikota Makassar 2024 berada dalam kondisi yang rapuh dan problematik. Suara mereka tidak lahir dari kesadaran politik yang otonom, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi jangka pendek dan praktik politik uang yang mengakar. Dengan menggunakan pendekatan teori pertukaran sosial Peter M. Blau, ditemukan bahwa mayoritas relasi antara pemilih miskin dan kandidat berlangsung dalam bentuk pertukaran ekstrinsik yang berorientasi pada materi. Bahkan muncul tipologi baru, yaitu pertukaran bandit, yang menunjukkan relasi saling manipulatif dan tidak etis antara pemilih dan tim sukses.

Kondisi ini mencerminkan wajah demokrasi lokal yang belum substantif. Politik uang bukan hanya persoalan moralitas, tetapi bagian dari struktur sosial yang timpang. Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, tekanan ekonomi tinggi, dan lemahnya literasi politik, praktik transaksional menjadi pilihan rasional sekaligus survival. Demokrasi dalam konteks ini dipahami bukan sebagai proses partisipatif, melainkan sebagai ruang barter

kepentingan yang sesaat. Hal ini memperkuat marginalisasi politik kelompok miskin dan menjauhkan mereka dari pengambilan keputusan yang berdampak jangka panjang.

Untuk itu, dibutuhkan dua pendekatan rekomendasi. Pertama, dari sisi penelitian, perlu dilakukan kajian lanjutan terhadap dinamika relasi tim sukses, RT/RW, dan aktor lokal dalam distribusi imbalan politik. Kedua, dari sisi kebijakan, diperlukan penguatan pendidikan politik berbasis komunitas, reformasi regulasi pengawasan kampanye, dan pembangunan sistem pemilu yang lebih menekan ruang gerak praktik politik uang di akar rumput.

V. REFERENSI

- Amaliah, N., dkk. (2014). Partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan OTORITAS*, 5(1), April.
- Amanu, M. (2015). *Politik uang dalam pemilihan kepala desa: Studi kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa Timur*. Malang: FISIP Unibraw Press.
- Arianto. (2018). Political transaction and expensive cost on regional head election. *Logos Journal*, 1(2), September.
- Auyero, J. (1999). From the client's point(s) of view: How poor people perceive and evaluate political clientelism. *Kluwer Academic Publisher Journal*, Netherlands.
- Bawaslu Sulsel. (2024). *Laporan pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 di Sulawesi Selatan*. Makassar: Bawaslu Provinsi Sulsel.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and power in social life*. New York: Wiley.
- Dendy Lukmajati. (2014). Praktek politik uang dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. *Jurnal Politika*, 7(1), April 2016.
- Fitriana, N. (2018). *Komunikasi ritual seniman dalam memproduksi karya seninya (studi fenomenologi mengenai komunikasi ritual seniman Rizki Luthfi Wiguna dalam memproduksi karya seni patung dan lukisan di ISBI Bandung)* [Skripsi]. Universitas Komputer Indonesia.
- Hatta, M. (1998). *Kebangsaan dan kerakyatan*. Jakarta: LP3ES.
- Hobsbawm, E. J. (2000). *Bandit sosial*. Jakarta: Teplok Press.
- Hygor, P. M. M., et al. (2018). The price of a vote: Diseconomy in proportion elections. *PLoS ONE*, 13(8). <https://journals.plos.org/plosone/article>
- Irawan, D. (2015). Studi tentang politik uang dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sempaja Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4).
- Juliansyah, E. (2007). *Pilkada: Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*. Bandung: Mandar Maju Press.
- KPU Makassar. (2024). *Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2024*. Makassar: KPU Makassar.

- Mahfud, M. D. (1999). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media.
- PolMark Indonesia. (2018). *Pemilih makin mandiri, politik uang tak efektif: Catatan dari sejumlah survei*. Jakarta: PolMark Indonesia.
- Qodir, Z. (2014). Politik uang dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan resolusinya. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).
- Rachbini, D. J. (2008). *Teori bandit*. Jakarta: RMBooks Publishing.
- Ritzer, G. (2014). *Teori sosiologi modern* (edisi ke-7). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sodikin. (2014). Kedaulatan rakyat dan pemilihan kepala daerah dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>
- Umiarso, E. (2014). *Interaksionisme simbolik: Dari era klasik hingga modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. (n.d.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (n.d.). Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.